

BAB IV

MEMBANGUN DAN MERAWAT JARINGAN PEMENANGAN

Bab ini secara spesifik menganalisis proses membangun serta merawat jaringan pemenangan oleh Ajeng sebagai politisi perempuan. Ekspansi jaringan pemenangan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya dilihat berjalan beriringan dengan proses penguatan posisi politiknya. Posisi Ajeng di internal PKB dan parlemen semakin diperhitungkan. Ia kemudian menduduki berbagai jabatan yang cukup prestisius. Kedudukan ini juga menjadi amunisi bagi Ajeng untuk bisa masuk dan diterima di berbagai jejaring yang lain. Selanjutnya, bagian terakhir memotret berbagai tantangan yang dijumpai oleh Ajeng dalam membangun dan merawat jaringan pemenangannya dengan lanskap disparitas gender.

Penting dicatat, kenaikan jumlah suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu menandakan keberhasilan Ajeng dalam membangun dan merawat mesin politik, terutama jaringan. Terdapat dua aspek yang saling berkelindan dalam fenomena ini. Pertama, jaringan terbukti memainkan fungsi yang signifikan untuk memperluas basis pemilih dan memperbanyak suara yang diperoleh kandidat. Mereka adalah perantara yang dapat menghubungkan kandidat dengan pemilih, sekaligus menjadi juru sosialisasi agar kandidat semakin dikenal luas. Kedua, Ajeng sebagai kandidat perempuan dalam hal ini berperan sebagai agen yang aktif. Temuan ini berkontradiksi dengan beberapa studi terdahulu, yang kadangkala justru mengesampingkan kegigihan dan kapabilitas kandidat perempuan dan melihatnya sebagai agen yang pasif (Choi, 2019; Aspinall, White, & Savirani, 2021; Wardani & Subekti, 2021). Kegigihan Ajeng tercermin dalam kesediaannya untuk berulang

kali ikut serta dalam kontestasi politik dari 2009, 2014, 2019, dan 2024. Kepercayaan masyarakat dan partai dalam menempatkan Ajeng di berbagai posisi strategis cukup untuk merefleksikan kapabilitas yang dimilikinya. Temuan ini secara substantif sejalan dengan studi yang melihat bahwa perempuan yang berasal dari aktivisme akar rumput dan non-dinasti sekalipun dapat memiliki peluang yang sama dalam menduduki kepemimpinan politik (Bayo, 2021).

4.1. Gender, Ekspansi Jaringan, dan Penguatan Posisi Politik Kandidat Perempuan

Transformasi jaringan politik Ajeng dari bentuk yang semula homogen menuju konfigurasi yang semakin heterogen mencerminkan adanya perluasan dan diversifikasi basis dukungan sosial-politiknya. Perubahan ini menjadi indikator penting bahwa penguatan posisi dalam ranah politik lokal menuntut kapasitas untuk menjangkau dan merangkul berbagai kelompok sosial secara lebih luas. Artinya, untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam hierarki politik, seorang aktor politik harus mampu membangun jaringan yang inklusif dan lintas-segmen. Logika resiprokal juga berlaku dalam konteks ini. Keberhasilan menjangkau massa dalam skala besar juga dapat menjadi katalisator bagi peningkatan posisi struktural dari level akar rumput menuju lingkaran elit. Keaktifan aktor maupun jaringannya dapat sama-sama menentukan proses ekspansi jaringan dan penguatan posisi politik.

Temuan ini sekaligus menegaskan kapasitas Ajeng dalam membangun dan merawat jaringan politik secara berkelanjutan sebagai instrumen strategis yang berperan signifikan dalam proses kemenangan pemilu, serta dalam dinamika politik dari satu kontestasi ke kontestasi berikutnya. Dalam konteks ini pula tampak

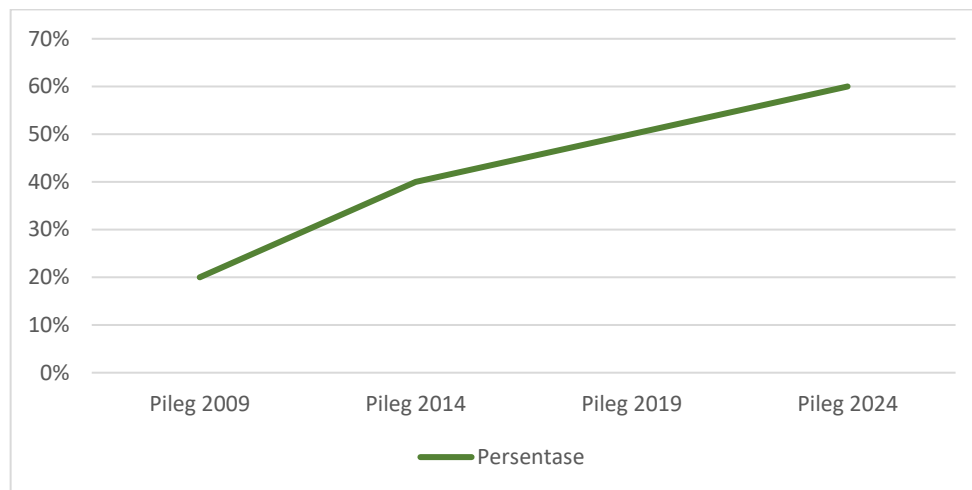
perbedaan karakter Ajeng sebagai politisi perempuan. Ia bukan figur “*taken for granted*”, meskipun suaminya memiliki posisi struktural sebagai kepala desa. Di percaturan politik lokal, kepala desa masih memiliki pengaruh yang kuat. Ajeng menunjukkan upaya dan kerja politik yang aktif. Posisi struktural suaminya sebagai kepala desa tidak dimanfaatkan secara pasif atau instan, melainkan dikapitalisasi melalui strategi politik yang cermat dan kapabilitas diri yang memadai. Karier politik Ajeng pun tidak hanya ditandai oleh keberhasilan menduduki posisi formal di struktur partai maupun parlemen, tetapi juga oleh penerimaan yang luas dari masyarakat. Ini menunjukkan legitimasi sosial yang bersifat dua arah, yakni dari sisi institusional dan kultural.

Temuan di atas dalam derajat tertentu sejalan dengan riset-riset terdahulu yang berhasil memotret keberhasilan politisi perempuan akar rumput memenangkan kontestasi (Muzadi & Fitriyah, 2020; Mahsun, Elizabeth, & Mufrikah, 2021; Bayo, 2021; Swarizona & Raffiudin, 2021; Lagabuana, Sukri, & Haryanto, 2021). Namun, ada perbedaan dalam hal titik pijak dari kandidat perempuan dalam menapaki proses serta dinamika politiknya. Sebagian besar temuan sebelumnya memperlihatkan politisi perempuan yang berkontestasi telah memiliki atribusi simbolik dan posisi struktural sejak awal. Sementara itu, Ajeng memulai karier politiknya dari level akar rumput dengan bekal pengalaman organisasi, tanpa posisi struktural yang mentereng. Atribusi-atribusi struktural dan simbolik justru diperolehnya secara gradual melalui proses politik yang panjang, termasuk pengalaman kegagalan dalam pencalonan pada Pemilu 2014, yang menjadi titik balik strategi jejaring politiknya.

Lebih jauh, perbedaan mendasar lainnya dengan penelitian terdahulu terletak pada cakupan temporal dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya memotret satu fase politik secara statis, melainkan menelusuri perjalanan politik Ajeng secara periodik. Pada saat menggerakkan mesin politik, ada dinamika-dinamika yang mengiringi mulai dari proses membangun, menyesuaikan, dan mengembangkan jaringan politik dalam menghadapi berbagai resistensi maupun peluang yang berubah-ubah dari satu periode ke periode berikutnya. Jaringan politik bukan entitas statis atau sekali jadi. Mereka harus dirawat secara strategis dan dapat direstrukturisasi sesuai kebutuhan. Logika ini memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam atas proses “*becoming*” seorang aktor politik perempuan, bukan sekadar “*being*”-nya dalam satu titik waktu tertentu.

Temuan lain di lapangan mencatat ada sedikit perbedaan komposisi antara tim sukses dengan konstituen Ajeng. Konstituen atau jaringannya secara luas, baik yang terlibat langsung dalam aktivitas pemenangan maupun hanya memilih di TPS, memang didominasi perempuan. Namun, keterlibatan langsung perempuan yang menjadi tim sukses Ajeng mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Ada berbagai faktor yang mengiringi, mulai dari aspek struktural, kultural, hingga psikologis. Gerak perempuan untuk masuk ke dalam ruang-ruang strategis pemenangan politik memang memerlukan waktu. Mereka pada awalnya memiliki kendala dalam hal keberanian. Hal ini turut berpengaruh pada kemampuan membaca medan politik dan menegosiasikan posisi mereka dalam struktur yang cenderung maskulin. Proses pengintegrasian perempuan menjadi tim sukses tidak instan. Kandidat dan aktor-aktor lain mesti paham agar tercipta partisipasi yang setara dan kontributif.

Gambar 4.1.
Keterlibatan Tim Pemenangan Perempuan



Sumber: Diolah dari Temuan Lapangan (2025)

Pada periode awal kontestasi di 2009, kurang lebih 80% timnya masih didominasi laki-laki, karena saat itu belum ada persiapan matang dan mesin yang bergerak adalah struktural partai. Tugas perempuan yang berada dalam jaringannya masih sebatas mendukungnya secara moral dan pada saat hari pemilihan tiba. Bergeser ke Pemilu 2014, komposisi 40% tim perempuan sudah mulai bisa digerakkan dalam aktivitas pemenangan. Dinamika yang terjadi pada saat itu cukup ketat dan Ajeng masih terhitung baru dalam politik, sehingga tim belum bergerak optimal. Hasil akhir juga belum mengantarkan Ajeng mencapai kemenangan. Namun, titik itu sekaligus menjadi pembelajaran untuk menggerakkan jaringan secara lebih maksimal. Di periode 2019, komposisi tim perempuan mencapai 50%. Pengalaman dari periode pemilu sebelumnya terbukti mampu menguatkan konsolidasi sekaligus kinerja tim. Kemudian pada Pemilu 2024 lalu, 60% tim pemenangan Ajeng telah didominasi oleh perempuan. Ruang gerak mereka

semakin luas. Kerjasama dalam internal tim dan kedekatan dengan konstituen juga semakin terjalin dengan baik. Kematangan gerak tim pemenangan dalam konteks ini semakin teruji, berbekal pengalaman lapangan dari waktu ke waktu.

Keputusan untuk menargetkan konstituen perempuan serta merekrut perempuan dalam komposisi tim pemenangan didasari oleh dua hal. Pertama, pertimbangan ideologis atau orientasi representasi gender. Kedua, preferensi ini juga berakar pada kalkulasi rasional yang mempertimbangkan efisiensi sumber daya dalam proses kontestasi. Memang benar, kedekatan emosional lebih mudah terbangun dengan konstituen secara luas karena Ajeng menyadari perannya sebagai “*gantar*” (galah) bagi sesama perempuan. Namun, di sisi lain, keterlibatan perempuan dinilai lebih “murah biaya” dibandingkan laki-laki, yang dalam praktiknya sering kali disertai dengan ekspektasi kompensasi material tambahan, seperti uang rokok, uang bensin, atau bentuk insentif lainnya. Sebaliknya, perempuan ketika sudah merasa terikat secara emosional dalam relasi sosial-politik, mereka mampu membangun hubungan yang lebih tulus, terbuka, dan penuh kepercayaan. Hal semacam ini lebih mudah diorganisir di dalam jaringan kampanye yang bersifat lokal dan berbasis kedekatan sosial.

Preferensi strategis ini juga bersifat kontekstual dan kultural yang berakar pada pemahaman Ajeng terhadap nilai-nilai dan idiom sosial masyarakat Jawa. Salah satunya melalui analogi “*tibo melas*” (jatuh dalam belas kasih). Perempuan, dalam pandangan lokal ini, kerap diasosiasikan dengan simbol kesetiaan, ketulusan, dan pengabdian, sehingga dianggap lebih loyal dalam mengawal proses politik, terutama dalam situasi keterbatasan sumber daya. Strategi Ajeng tidak hanya

mencerminkan kalkulasi rasional dalam pembentukan tim dan jaringan politik, tetapi juga menunjukkan sensitivitas terhadap modal kultural dan simbolik yang beroperasi dalam konteks sosial tempat ia berkiprah. Gender mewakili kategori identitas sekaligus modal yang bisa dimobilisasi secara strategis. Efeknya, identitas dan modal tersebut dapat menunjang keberhasilan elektoral melalui efisiensi dan efektivitas jejaring sosial.

Strategi serupa telah dibahas dalam penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pemilih perempuan cenderung memberikan suara mereka kepada kandidat perempuan dibandingkan kandidat laki-laki, dan kandidat perempuan yang menargetkan pemilih perempuan serta menggunakan jaringan perempuan dalam tim kampanyenya memiliki tingkat keterpilihan yang lebih tinggi (Aspinall, White, & Savirani, 2021). Catatan temuan sebelumnya terletak pada faktor kelembagaan dan konteks budaya dalam menilai situasi seperti apa yang memungkinkan munculnya efek afinitas gender. Secara kelembagaan, Ajeng memiliki keleluasaan untuk mengorganisasi jejaring politiknya sesuai dengan preferensi strategis dan kebutuhan praktis di lapangan. Di sisi lain, konteks budaya lokal yang sarat nilai-nilai komunal mampu memperkuat efektivitas strategi ini. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang masih sangat mengandalkan relasi interpersonal dan kedekatan emosional, perempuan dianggap memiliki keunggulan dalam menjalin komunikasi intim dan membangun jaringan kepercayaan. Corak masyarakat desa relevan dengan ciri ini. Penekanan terhadap nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan empati, mampu membentuk afinitas gender, bahkan meluas.

Studi terdahulu turut mencatat perihal tim pemenangan perempuan yang dinilai lebih loyal dibandingkan laki-laki (Darwin, 2017). Penjelasan tentang hal ini relevan dengan temuan lapangan di atas. Militansi tim perempuan ketika sudah memutuskan untuk mendukung kandidat tertentu dan cenderung memilih untuk tidak berkhianat digambarkan melalui ungkapan “bekerja dengan hati”. Kebanyakan dari mereka lebih melihat unsur investasi sosial kepada kandidat dibandingkan dengan imbalan finansial semata. Mereka menitipkan harapan pada kandidat yang didukungnya untuk memerhatikan isu-isu perempuan. Ketika kandidat terpilih, mereka berharap akan ada program-program yang pro perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada tujuan yang lebih besar terkait penerjemahan suara mereka saat pemilu. Dalam konteks keterpilihan Ajeng di Pemalang, afinitas gender terbangun karena minimnya suara vokal tentang isu-isu perempuan dan anak yang terlontar dari politisi laki-laki.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah keterlibatan laki-laki dalam tim pemenangan tetap penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan peran dan kebutuhan taktis di lapangan. Tim perempuan kerap kali menghadapi intimidasi atau manuver agresif dari tim lawan. Dalam kasus Ajeng, tim laki-laki berperan sebagai pelindung dan pengawas yang memastikan pergerakan tim perempuan agar tidak diganggu secara fisik maupun psikologis. Perempuan memiliki keunggulan sebagai agen sosialisasi yang bekerja melalui jaringan informal dan berbasis komunitas. Mereka mampu memanfaatkan relasi sosial yang intim dan berjenjang, mulai dari memengaruhi suami dan keluarga inti, menjangkau jamiyah dalam konteks jaringan keagamaan, hingga menyebarkan pesan politik melalui

komunikasi informal seperti obrolan antar tetangga. Agar optimalisasi peran ini berbanding lurus dengan perolehan suara, pergerakan tim perempuan perlu dipastikan keamanannya. Dari sinilah terdapat arti penting dan dukungan dari tim laki-laki.

Pada awal pergerakan Ajeng sebagai caleg, tidak sedikit anggota tim perempuannya yang merasa takut, bahkan ada yang memilih mundur karena gertakan di lapangan. Namun, ketahanan dan kapasitas mereka semakin kuat dan teruji dari empat kali dinamika kontestasi. Mereka belajar dari pengalaman lapangan. Keberanian itu juga tumbuh karena Ajeng selalu meyakinkan mereka bahwa ia menjamin keamanan dan kelancaran pergerakan semua elemen kemenangan. Jaminan ini menjadi penting, karena dari situlah kepercayaan dan kedekatan emosional dapat terbangun di antara kandidat dengan lingkaran jaringannya.

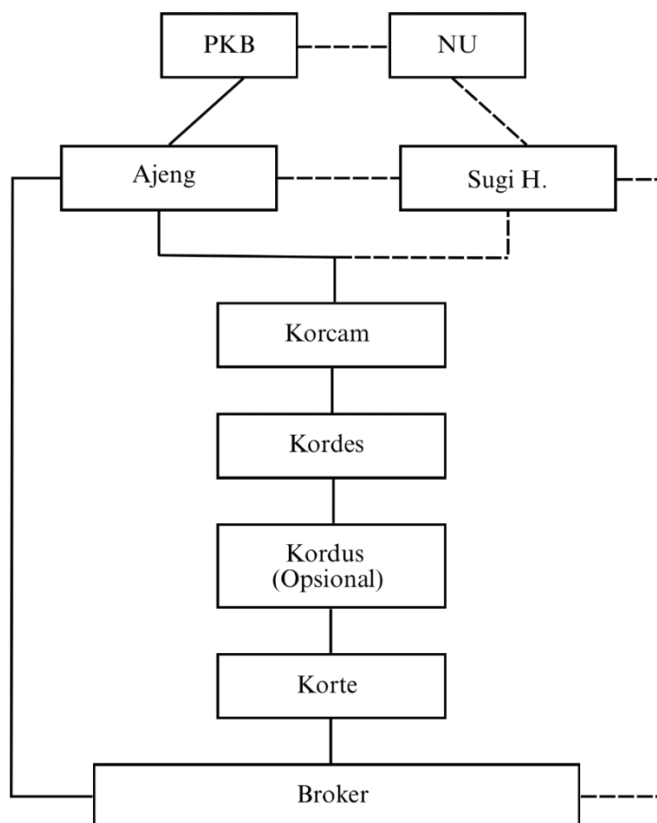
Salah satu temuan menarik di lapangan selama proses kemenangan Ajeng sebagai calon legislatif adalah peran perempuan dalam sosialisasi dan promosi politik terbukti lebih efektif dibandingkan tim laki-laki. Banyak anggota tim kemenangan laki-laki justru mendelegasikan sebagian besar tugasnya kepada istri mereka. Misalnya dalam hal mengenalkan kandidat kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya dan mendata pemilih potensial. Orang-orang kepercayaan suami Ajeng yang memiliki posisi struktural di desa juga banyak mendelegasikan tugas-tugas kampanye kepada istrinya. Dalam konteks ini, pendelegasian tugas lebih didasarkan pada menjaga citra netralitas dan etika. Peran besar tim laki-laki lebih terletak pada manuver “perang darat” dalam proses kampanye. Walaupun Ajeng

telah menjadi kandidat yang kuat, tetapi pergerakan rival tidak dapat diabaikan. Justru karena posisi Ajeng semakin tinggi, persaingan semakin diwarnai dengan dinamika dan gejolak.

Secara struktural, tidak ada perbedaan gender dalam komposisi tim sukses Ajeng. Posisi-posisi krusial seperti koordinator atau semacamnya bisa dipegang oleh laki-laki maupun perempuan, asalkan mereka memiliki pengaruh di lingkungannya dan loyal. Model ini menunjukkan pergeseran pola kerja tim sukses yang biasanya bersifat hierarkis dan maskulin, menuju pola yang lebih inklusif berbasis relasi sosial dan rasionalitas.

Gambar 4.2.

Struktur Tim Sukses Kandidat



Sumber: Diolah dari Temuan Lapangan (2025)

Hierarki dalam struktur di atas sebenarnya tetap ada. Namun, fungsinya hanya sebagai gambaran alur koordinasi dan sifatnya tidak mutlak. Fleksibilitas ini terlihat pada *plotting* di lapangan. Koordinator kecamatan (korcam) bertugas menjembatani koordinasi di level kecamatan. Sesuai dapil Ajeng, kecamatan yang dimaksud adalah Ampelgading dan Petarukan. Akan tetapi, *plotting* di tingkat desa tidak selalui seragam. Di Petarukan misalnya. Tidak semua desa memiliki koordinator desa (kordes), karena wilayah ini bukan basis utama. Penempatan kordes hanya dilakukan di desa-desa yang dianggap memiliki potensi suara. Struktur di Kecamatan Ampelgading yang menjadi basis utama juga tidak selalu sama. Misalnya di Desa Blimbing, keberadaan kordes dianggap kurang perlu karena korcam yang ditunjuk berasal dari desa tersebut. Fleksibilitas ini juga dipraktikkan berdasarkan pertimbangan geografis dan demografis. Di Desa Kebagusan contohnya, struktur ditambahkan pada level dusun dengan menunjuk koorinator dusun (kordus) karena ada wilayah yang secara fisik terpisah di seberang Sungai Comal.

Penyesuaian ini mencerminkan pendekatan taktis dalam manajemen tim sukses, yang tidak terpaku pada struktur baku tetapi lebih pada kebutuhan strategis dan kondisi lapangan. Tidak hanya soal efisiensi kerja, fleksibilitas ini juga terkait erat dengan efisiensi biaya politik. Menyusun struktur kampanye secara idealis dan berjenjang sesuai teori organisasi memang terlihat rapi di atas kertas, tetapi pada praktiknya kerap membebani logistik kampanye dan belum tentu sebanding dengan hasil suara yang diperoleh. Karena itu, jenjang atau struktur yang diterapkan bersifat kondisional, menyesuaikan dengan peta dukungan, sumber daya yang

tersedia, serta proyeksi perolehan suara. Posisi seperti koordinator RT (korte) juga memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Mereka menjadi simpul penting dalam mengorganisir broker yang memiliki akses langsung ke calon pemilih. Dalam banyak kasus, efektivitas kerja-kerja politik justru bergantung pada fleksibilitas. Struktur bukan sekadar simbol koordinasi, tetapi alat taktis yang bergerak adaptif terhadap realitas sosial dan medan politik.

Garis dalam bagan di atas merepresentasikan relasi dan otoritas politik yang terbangun. Garis tebal lurus menandakan relasi langsung antara Ajeng dan struktur tim pemenangannya. Meskipun secara formal Ajeng bernaung di bawah partai politik, namun dalam praktiknya partai hanya berfungsi sebagai payung legal dan administratif. Pengorganisasian tim, strategi kampanye, hingga struktur internal tim kemenangan sepenuhnya diinisiasi dan dikendalikan oleh Ajeng. Hal ini menunjukkan tingkat otonomi politik yang tinggi. Ajeng membangun mesin politik berbasis jaringan personal dan sosial tanpa terlalu bergantung pada struktur partai, meskipun dalam derajat tertentu jaringannya banyak tertaut dengan basis massa PKB, lebih tepatnya kelompok Nahdliyin.

Sementara itu, garis lurus putus-putus dalam bagan menggambarkan relasi tidak langsung antara suami Ajeng dan struktur tim pemenangan. Sugi tidak terlibat secara eksplisit dalam tim. Perannya lebih cenderung sebagai pengawas atau dalam bahasanya ia sebut sebagai “*tukang ngecek*”. Posisi ini merupakan hasil dari pertimbangan kultural yang kompleks, khususnya terkait keterikatan dengan jaringan kultural NU. Sebagai seorang kepala desa, suami Ajeng memegang prinsip netralitas dan tidak bisa menampilkan afiliasi terbuka dengan PKB, meskipun

secara ideologis berada dalam spektrum yang sama. Dalam konteks inilah muncul istilah "aktor bayangan". Ia hadir sebagai penopang dan pelindung dari belakang layar yang memastikan jalannya kontestasi Ajeng.

Sikap suami Ajeng juga merefleksikan visi jangka panjang dalam membangun kapasitas politik istrinya. Ia dengan sadar memilih untuk tidak dominan dalam proses elektoral, agar Ajeng dapat tumbuh sebagai aktor politik yang independen dan matang. Ia berpendapat bahwa jabatan kepala desa bersifat sementara, sedangkan Ajeng tengah membangun fondasi politik yang lebih berjangka panjang. Oleh karena itu, struktur tim pemenangan harus dibangun secara otonom dan berkelanjutan, dengan tidak bergantung pada jabatan suami. Pandangan ini memperlihatkan dimensi gender dan kepemimpinan yang saling melengkapi. Peran suami sebagai bayangan justru memberi ruang aktualisasi lebih besar bagi kepemimpinan politik perempuan di tingkat lokal.

Selain membagi kerja tim berdasarkan struktur dan membangun pembagian peran yang jelas dengan suaminya, Ajeng juga mengorganisasikan tim pemenangannya berdasarkan kategori fungsional. Pengorganisasian ini bertujuan untuk memastikan efektivitas kerja-kerja politik sesuai dengan kebutuhan lapangan yang dinamis dan variatif. Setidaknya terdapat empat kategori utama dalam tim fungsional ini, yakni tim data, tim *sampling*, tim pendekatan, dan tim lapangan. Para *broker* masuk dalam kategori terakhir. Masing-masing tim memiliki mandat tugas yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam strategi pemenangan.

Tim data mayoritas diisi oleh pemuda, terutama mereka yang memiliki kapasitas digital dan numerik. Tugas utama mereka adalah mengolah, menghitung,

dan memverifikasi data dari lapangan agar informasi mengenai potensi pemilih dapat dipetakan secara lebih akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Target idealnya adalah agar data potensi pemilih yang dikumpulkan bisa berbanding lurus dengan perolehan suara di hari pemilihan.

Sementara itu, tim *sampling* relatif baru dalam tim kemenangan Ajeng. Tim ini dibentuk dengan tugas menyerupai lembaga survei, yakni menilai tingkat elektabilitas Ajeng di berbagai titik dapil. Tim ini bekerja dengan metode *sampling* sederhana dan bersifat internal untuk membaca kecenderungan dukungan serta merumuskan strategi pendekatan yang lebih akurat. Namun, Ajeng mengungkapkan kinerja tim ini belum maksimal. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki, juga soal perlunya modal yang lebih besar untuk mengoptimalkan kerja-kerja survei.

Tim pendekatan memainkan peran sebagai jembatan politik. Mereka bertugas membangun komunikasi awal dengan pemilih-pemilih yang belum tersentuh secara maksimal, tetapi dianggap potensial untuk dikonsolidasi. Fungsi tim ini sering kali beririsan dengan kerja-kerja pendekatan sosial dan kultural, termasuk lewat tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, atau jalur informal lainnya. Kinerja tim pendekatan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari temuan tim *sampling*. Kontinuitas proses ini menjadi penting karena Ajeng menargetkan perluasan jaringan dan basis massa. Selain itu, proses penguatan posisi dalam politik memerlukan formulasi strategi pendekatan yang lebih matang, agar kandidat diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

Tim lapangan menjadi ujung tombak operasional kampanye. Mereka bertugas melakukan eksekusi teknis di lapangan, mulai dari pemasangan atribut kampanye seperti spanduk, brosur, stiker, hingga mendistribusikan bentuk-bentuk patronase politik sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah. Para *broker*, yang biasanya memiliki pengaruh sosial di lingkungan mikro, ditempatkan dalam tim ini karena dianggap mampu menjembatani distribusi bantuan atau dukungan sesuai pembacaan situasi dan keperluan di lapangan. Melalui pengorganisasian fungsional ini, Ajeng membangun tim kampanye yang adaptif terhadap konteks lokal sekaligus terukur secara sistematis.

Menyadur kategori Darwin (2017), pembagian tim secara fungsional relevan dengan tiga peran *broker* sebagai konektor, distributor, dan mobilisator. Tim pendekatan menjalankan fungsi sebagai *konektor* antara kandidat dengan pemilih potensial. Mereka bertugas untuk memetakan preferensi warga di berbagai lokasi, serta menggali harapan-harapan yang belum terakomodasi oleh aktor politik lain. Pertanyaan seperti "apa yang dibutuhkan warga?", "bagaimana mereka membayangkan sosok wakil yang ideal?", dan "masalah apa yang mendesak untuk diselesaikan?" menjadi indikator penting dalam strategi pendekatan yang bersifat personal maupun komunal. Fungsi konektor ini menjembatani logika elektoral dengan kebutuhan substantif masyarakat, sehingga memperluas kemungkinan konversi pemilih menjadi basis dukungan aktif. Tim lapangan memegang peran ganda sebagai *distributor* sekaligus *mobilisator*. Mereka tidak hanya bertugas mendistribusikan media kampanye seperti *banner*, brosur, hingga bentuk-bentuk patronase, tetapi juga berperan dalam menggerakkan masyarakat agar hadir dalam

agenda-agenda kandidat. Peran mereka menjadi penting dalam konteks politik lokal yang masih sangat bergantung pada mobilisasi langsung. Pertemuan tatap muka, kehadiran simbolik, dan partisipasi fisik dalam kampanye masih menjadi ukuran kekuatan kandidat. Tim data dan tim *sampling* melengkapi tiga peran tersebut dengan beroperasi dari balik meja, berfokus pada kerja-kerja konseptual dan administratif.

Berdasarkan uraian di atas, Ajeng membangun dan mengorganisasikan jaringan pemenangan dengan model yang berkembang mulai dari *bonding*, *bridging*, hingga *linking*. Klasifikasi ini mengadopsi konsep modal sosial Putnam (2000) yang bisa digunakan untuk menganalisis pendekatan berjejaring. Tiga bentuk ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam proses keterpilihan Ajeng, model pendekatan berjejaring berjalan secara simultan dan menunjukkan tahapan strategis pada konteks ekspansi jaringan, yang pada akhirnya mampu menjadi sarana penguatan posisi politik.

Pada fase awal kontestasi, Ajeng membangun jaringan dengan model *bonding*. Jaringan ini berakar kuat dari komunitas Nahdlatul Ulama (NU), terutama melalui jalur jamiyah perempuan. Ia juga telah memiliki komunitas perempuan dari atribusinya sebagai istri kades, yakni PKK dan jaringan arisan sembako. Akan tetapi, jaringan yang lebih kuat dan solid berasal dari jamiyah NU sebagaimana yang disebutkan di atas. Lingkaran ini memberikan basis dukungan awal yang loyal karena dibangun di atas fondasi nilai-nilai keagamaan, kultural, dan hubungan personal yang telah terbentuk jauh sebelum Ajeng memasuki politik formal. Di titik ini, solidaritas kolektif terbentuk bukan karena transaksi politik, tetapi karena

kesamaan identitas kultural dan spiritual. Namun, sebagaimana lazimnya model *bonding*, lingkup jaringan ini cenderung sempit dan kurang mampu menjangkau komunitas di luar ekosistem sosial yang homogen tersebut. Ketergantungan pada ikatan yang kuat tapi eksklusif ini juga menyimpan risiko stagnasi dukungan, terutama saat berhadapan dengan medan politik yang menuntut perluasan basis massa.

Menyadari hal tersebut, Ajeng secara perlahan mulai mengembangkan strategi *bridging* sebagai upaya ekspansi horizontal. Ia merangkul komunitas-komunitas yang berbeda identitas sosialnya, seperti kelompok lintas agama, komunitas hobi seperti *kolongan doro*, serta jaringan ekonomi informal seperti pedagang pasar. Jaringan perempuannya juga diperluas. Ia menggandeng Yayasan PEKKA untuk mencakup komunitas perempuan secara lebih luas dan menggalakkan program-program konkrit yang bisa memberi kontribusi pada masyarakat. Pada tahap ini, kerja-kerja politiknya mulai menyeberang batas sosial-kultural yang selama ini mendominasi lingkaran pendukungnya. Meskipun relasi yang dibangun dalam model *bridging* tidak seintens *bonding*, ia menawarkan jangkauan yang lebih luas dan membuka peluang konversi dukungan dari berbagai segmen pemilih. Namun, pendekatan ini membutuhkan proses adaptasi dan dialog yang terus-menerus, karena hubungan antar kelompok berbeda seringkali menghadapi resistensi identitas dan kepentingan yang tidak selalu selaras.

Transformasi jaringan Ajeng mencapai bentuk yang lebih kompleks ketika ia mulai terhubung secara vertikal melalui model *linking*. Seiring dengan naiknya posisi politik dan kapasitas elektoralnya, Ajeng mulai menjalin relasi dengan

jaringan elit lokal, termasuk pengusaha, tokoh partai, dan pemegang akses distribusi sumber daya politik. Koneksi ini dibangun secara strategis untuk memperkuat dukungan finansial atau logistik kampanye dan mendapatkan legitimasi politik dalam tataran yang lebih luas. Dalam konteks politik lokal, *linking social capital* ini menjadi instrumen penting untuk memperluas pengaruh ke ranah birokratik dan struktural yang tidak bisa dijangkau hanya dengan *bonding* atau *bridging* semata. Misalnya, melalui jaringan suaminya sebagai kepala desa, Ajeng memiliki akses tersendiri ke struktur pemerintahan lokal, meskipun secara formal hubungan itu dibatasi karena pertimbangan etis dan hukum netralitas jabatan publik.

Kombinasi dari ketiga bentuk model strategi ini menjadi fondasi penting bagi strategi pemenangan yang bersifat progresif dan dinamis. Setiap tahapan dari *bonding*, *bridging*, hingga *linking*, tidak berdiri sendiri. Secara berkelanjutan model-model ini menopang kandidat perempuan dalam membangun kekuatan politik yang berbasis ikatan psikologis dan rasionalitas strategis. Perpaduan jaringan *grassroots* dan koneksi elit ini menjadi sumber daya simbolik dan material yang memungkinkan kandidat mempertahankan kontinuitas mesin politiknya di tengah fluktuasi medan elektoral. Ia bukan hanya menjahit kekuatan massa melalui kedekatan personal dan kultural, tetapi juga merancang infrastruktur politik yang mampu menavigasi lanskap kekuasaan secara vertikal. Studi kasus Ajeng berhasil menunjukkan bahwa proses membangun kekuatan politik perempuan di tingkat lokal tidak melulu harus bergantung pada struktur partai atau figur suami, tetapi bisa dibentuk melalui akumulasi modal sosial yang tumbuh dari bawah, melebar ke samping, dan menjulur ke atas.

Cara Ajeng mengorganisasikan kekuatan politiknya menunjukkan pergeseran penting dalam dinamika representasi dan partisipasi politik perempuan di tingkat akar rumput. Kandidat perempuan tidak sekadar menjadi representasi simbolik, tetapi benar-benar menjalankan fungsi substantif sebagai penggerak politik dari bawah yang mampu membaca konteks, memanfaatkan jaringan, dan mengelola kekuasaan secara strategis. Transformasi ini menandai pergeseran peran perempuan dari posisi pasif dalam politik menjadi aktor utama yang mampu menciptakan struktur politiknya sendiri. Strateginya yang berangkat dari *bonding* kultural ke *bridging* sosial hingga *linking* struktural, membuktikan bahwa kekuatan politik perempuan dapat dibangun dari basis kultural yang selama ini dianggap domestik, dan berkembang menjadi kekuatan struktural yang diakui dalam medan kontestasi publik. Pengalaman Ajeng juga menunjukkan bagaimana aktor perempuan mampu bertransformasi secara simultan dalam dua ranah: secara individual sebagai subjek politik yang makin matang dan berdaya, serta secara kolektif melalui penguatan jaringan perempuan di komunitasnya. Misalnya, saat ia menjadikan jamiyah perempuan NU sebagai fondasi awal *bonding*, yang kemudian diperluas melalui relasi horizontal ke kelompok lintas komunitas, kita dapat melihat bahwa proses tersebut turut memberi ruang bagi komunitas dan figur perempuan lainnya untuk terlibat lebih aktif dalam politik.

Strategi Ajeng menghadirkan sebuah model baru tentang bagaimana perempuan dapat membangun kekuasaan tanpa harus mengadopsi total pola maskulin atau menjadi subjek dalam bayang-bayang kekuasaan suaminya. Ia membagi peran secara sadar dengan suaminya yang menjabat sebagai kepala desa,

tetapi tetap menjaga otonomi politiknya sendiri. Bahkan, dalam narasi internal tim, suaminya justru mendorong Ajeng untuk bergerak secara independen agar proses belajar politiknya menjadi matang dan berkelanjutan. Transformasi sosial yang ditunjukkan penting untuk dibaca sebagai bagian dari perluasan ruang agensi perempuan dalam politik lokal. Ia membongkar asumsi-asumsi lama bahwa kekuatan politik perempuan hanya bisa tumbuh lewat dukungan laki-laki atau afiliasi struktural partai secara dominan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kekuatan itu bisa dibangun dari bawah, dari ruang-ruang sosial, kultural, dan jaringan informal.

Tabel 4.1.

Penggunaan Model Pendekatan dan Strategi Berjejaring

Jenis	Penggunaan
<i>Bonding Social Capital</i>	Digunakan untuk membangun jaringan kemenangan pada awal kontestasi. Jaringan yang terbentuk cenderung homogen dan lingkupnya terbatas di kultural NU, khususnya segmen perempuan.
<i>Bridging Social Capital</i>	Digunakan untuk memperluas jaringan sosial secara horizontal lintas komunitas. Jaringan yang terbentuk relatif heterogen, mulai dari antar agama, komunitas hobi, hingga sektor ekonomi dalam derajat yang masih setingkat.
<i>Linking Social Capital</i>	Digunakan untuk memperluas jaringan sekaligus mendukung proses mobilitas vertikal. Jaringan yang terbentuk bersifat heterogen dan struktural lintas kelas, seperti relasi dengan para pemodal hingga elit politik.

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Jaringan yang telah dibangun selama proses kontestasi juga harus dirawat. Terlebih, kekuasaan di tingkat lokal sangat bergantung pada kapasitas

mempertahankan dan merawat jaringan secara konsisten pasca-kontestasi. Ajeng melakukan tugas perawatan jaringan melalui strategi yang berbasis pada praktik sosial dan kedekatan emosional dengan konstituen. Ajeng memahami bahwa kekuatan politik tidak hanya dibentuk saat pemilu berlangsung, tetapi juga dipelihara dalam keseharian relasi sosial. Oleh karena itu, ia secara rutin menghadiri pengajian, datang ke hajatan warga, melayat saat ada yang meninggal, dan bahkan secara aktif menanggapi aduan warga yang membutuhkan akses cepat ke layanan publik seperti rumah sakit. Dalam setiap interaksi ini, Ajeng menjalankan fungsi representasi politik secara substantif. Ia menampung aspirasi, memfasilitasi kebutuhan, dan menjaga relasi personal yang telah terbangun. Ia sendiri menggambarkan pendekatan ini dengan ungkapan reflektif, “*mumpung suaraku masih berpengaruh dan tanda tanganku masih laku,*” yang menandakan kesadaran akan posisi kuasa yang bersifat temporal dan harus dimanfaatkan untuk memperkuat simpul-simpul dukungan.

Dalam konteks alokasi sumber daya, Ajeng menerapkan prinsip pembagian yang ia rumuskan secara informal sebagai *rumus 50-50*, yakni separuh dari pendapatan politik digunakan untuk kebutuhan pribadi, sementara separuh lainnya didedikasikan untuk kepentingan konstituen. Langkah ini memperlihatkan adanya orientasi pada distribusi manfaat kekuasaan secara lebih kolektif, serta menjadi bentuk tanggung jawab moral-politik terhadap pemilihnya. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk-bentuk patronase tetap menjadi bagian dari strategi pemeliharaan jaringan. Politik uang, meskipun bukan prioritas, tetap dilakukan dalam kapasitas tertentu untuk merespons ekspektasi masyarakat

dan mengimbangi taktik lawan. Pendekatan Ajeng cenderung lebih diarahkan pada pemberian barang bersama dengan filosofi “*menghidupi komunitas*”. Contohnya adalah dana untuk perbaikan musala, kegiatan pengajian, bantuan renovasi gedung TPQ, kas organisasi, dan semacamnya. Strategi ini dinilai lebih efektif untuk memupuk solidaritas sosial dan membangun loyalitas jangka panjang. Padahal, dari sisi biaya maupun tenaga, pendekatan ini cenderung sama beratnya, atau bahkan lebih mahal dibanding politik uang konvensional.

Kecenderungan Ajeng untuk mengandalkan jaringan informal dalam pengelolaan mesin politiknya juga menjadi alasan mengapa strategi *maintenance* ini sangat penting. Dalam ruang politik lokal yang belum sepenuhnya terlembagakan, jejaring informal seperti komunitas keagamaan, hubungan kekerabatan, dan struktur sosial tradisional masih menjadi kanal utama distribusi pengaruh politik. Maka dari itu, kerja-kerja sosial tidak hanya bermakna sebagai wujud *care politics*, tetapi juga menjadi fondasi dari keberlanjutan kekuatan politik yang bersandar pada kepercayaan, kedekatan, dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat di tingkat akar rumput.

Temuan pada kasus Ajeng menunjukkan konsistensi dengan berbagai studi sebelumnya mengenai kandidat perempuan dalam kontestasi elektoral lokal yang tetap menggunakan strategi patronase sebagai salah satu strategi untuk meraih dukungan pemilih (Swarizona & Raffiudin, 2021; Fadlilah, 2020). Berbagai bentuk patronase digunakan, mulai dari pembagian barang-barang simbolik seperti jilbab, kebutuhan rumah tangga, dan bantuan ekonomi lainnya. Kandidat perempuan pun tidak lepas dari logika praksis politik lokal yang sangat kental dengan relasi

transaksional dan ekspektasi material dari pemilih. Namun, studi ini sekaligus menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan sejumlah argumen dalam literatur tentang modal sosial, khususnya yang menyatakan bahwa keberadaan jaringan sosial yang kuat dapat mereduksi praktik-praktik patronase dan klientelisme (Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah, 2021). Dalam kasus Ajeng, praktik-praktik patronase dan klientelisme justru sangat diperlukan untuk menjalin ikatan dan memperluas jaringan.

Pergeseran kultur politik yang semakin menunjukkan gejala materialistis turut mendorong patronase dan klientelisme menjadi semacam keniscayaan (Aspinall & Berenschot, 2019). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi nilai dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan politik. Dalam konteks budaya politik yang belum sepenuhnya rasional-ideologis, kepemilikan sumber daya ekonomi dipandang sebagai indikator kelayakan dan kapasitas seorang kandidat. Masyarakat tidak lagi melihat praktik politik uang sebagai sesuatu yang tabu atau koruptif, melainkan sebagai bentuk kelaziman bahkan “kewajaran” dalam kontestasi. Di banyak kasus, permintaan datang justru dari pemilih sendiri, yang memosisikan dirinya sebagai pihak yang “berhak meminta kompensasi” atas suara yang diberikan. Di sinilah letak paradoksnya. Praktik patronase bukan hanya bertumpu pada inisiatif kandidat, melainkan juga pada permintaan aktif dari masyarakat. Sudut pandang ini memaknai bentuk-bentuk patronase sebagai bagian dari kalkulasi sosial antara apa yang disebut sebagai “layak dipilih” dan “layak diberi”.

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa relasi politik sering kali dibentuk oleh logika timbal balik yang bersifat material dan simbolik. Patronase tidak semata-mata instrumen kendali politik elit terhadap massa. Praktik itu juga menjadi bentuk negosiasi antara aktor politik dengan jaringan sosial yang mereka bentuk dan rawat. Di titik ini, patronase terintegrasi dalam satu ekosistem politik informal yang dinamis. Studi kasus Ajeng menjadi refleksi penting bahwa dalam kondisi sosial tertentu, terutama ketika pemilih memiliki orientasi pragmatis dan akses terhadap sumber daya publik bersifat terbatas, praktik patronase dan klientelisme bukanlah bentuk penyimpangan demokrasi semata. Patronase justru menjelma menjadi “mekanisme fungsional” untuk membangun dan mempertahankan relasi sosial. Dengan demikian, daripada melihat praktik ini sebagai residu masa lalu yang harus dihapus, perlu pendekatan yang lebih kontekstual untuk memahami bagaimana praktik patronase menjadi bagian dari *moral economy of vote* dalam lanskap politik lokal kontemporer.

Strategi Ajeng dalam membangun dan mempertahankan jaringan politik menunjukkan tingkat kepiawaian yang tinggi, khususnya dalam mengatasi kendala umum yang sering melekat pada jaringan pemenangan yang cenderung bersifat *ad hoc* atau temporer. Ajeng berhasil menjaga kesinambungan jaringan dengan mempertahankan sekitar 80% anggota lama dalam siklus pemilu berikutnya. Hal ini mencerminkan loyalitas yang kuat dan adanya proses internalisasi nilai-nilai kolektif di antara anggota jaringannya. Sisanya merupakan penyesuaian tambal sulam yang wajar dalam dinamika kontestasi dan ekspansi politik.

Secara struktural, Ajeng mengadopsi dua model jaringan yang dikembangkan oleh Burt (2000), yakni *closure* dan *brokerage*. Saat membangun basis dukungan awal di lingkungan jamiyah perempuan dan komunitas kultural NU, jaringan bersifat *closure* yang cenderung padat, homogen, dan memiliki kohesi tinggi. Tipe ini cocok untuk memperkuat solidaritas internal dan menjaga stabilitas kontrol sosial. Namun ketika Ajeng mulai melakukan ekspansi horizontal melalui *bridging* dan mobilitas vertikal melalui *linking*, struktur jaringannya berkembang menjadi *brokerage*. Sifat jaringannya menjadi lebih terbuka untuk menghubungkan simpul-simpul jaringan yang sebelumnya belum terkoneksi. Kedua model ini memberi keunggulan berbeda. *Closure* memperkuat komitmen dan kepercayaan, sementara *brokerage* meningkatkan daya jangkauan dan akses terhadap informasi serta sumber daya eksternal.

Dalam konteks hubungan antarpersonal dan antarjaringan, Ajeng menunjukkan pendekatan yang selaras dengan konsep *tertius iungens*. Aktor berperan aktif sebagai penghubung atau penyatu antara pihak-pihak yang berbeda (Obstfeld, 2005). Ajeng menjalankan fungsi ini dengan menitikberatkan pada kolaborasi dan sinergi antarjaringan. Ia berusaha menjalin dan memperkuat koneksi antarkelompok, bahkan dengan rival politiknya dari partai lain, selama hal tersebut membawa manfaat kolektif yang lebih besar. Misalnya, di beberapa titik yang bukan basis kuatnya, Ajeng justru mempersilakan kandidat lain dari satu desanya untuk memaksimalkan potensi suara. Ia berdiri di atas harapan bahwa ketika rivalnya sama-sama terpilih, manfaat riil untuk masyarakat desanya akan lebih besar. Pendekatan *tertius iungens* ini memberi keunggulan strategis dalam hal

memperlancar arus informasi dan sumber daya antarjaringan (Llopis, D'Este, & Diaz-Faes, 2021), mengurangi gesekan kompetitif yang kontraproduktif, serta memperluas legitimasi politik secara etis dan berkelanjutan.

Sifat *tertius iungens* juga tercermin dalam cara Ajeng mendisiplinkan tim suksesnya. Berdasarkan laporan dari salah satu desa, terungkap adanya penyimpangan distribusi dana pada hari pemilihan. Uang yang seharusnya diberikan kepada pemilih yang sudah terdata tidak sampai ke tangan mereka. Alih-alih bereaksi keras atau secara langsung memberikan sanksi, Ajeng memilih pendekatan personal dan dialogis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sikap ini mencerminkan prinsip *tertius iungens*, karena Ajeng berperan sebagai jembatan yang menyatukan dan memperbaiki hubungan antaraktor dalam jaringan, ketimbang menciptakan polarisasi internal. Ajeng menyadari metode yang ia pilih untuk mendisiplinkan jaringan bisa berisiko pada pudarnya solidaritas. Ia paham bahwa dalam piramida tim sukses ada perbedaan kategori ikatan. Semakin ke bawah, relasi menjadi semakin sekunder, sehingga pengawasan dan komitmen cenderung melemah.

Berbagai dinamika yang menyertai kerja-kerja politik dan fluktuasi di lapangan telah menjadi risiko yang inheren dalam setiap proses pengorganisasian jaringan. Seiring dengan meluasnya jejaring dan naiknya posisi politik, konsekuensi yang harus dihadapi kandidat atau aktor politik juga akan semakin kompleks.. Ketahanan seorang aktor politik perempuan diuji dari kemampuannya membangun jaringan, kecakapannya menjaga kohesi internal, dan menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang adaptif. Kekuatan dan keberhasilannya mengelola

dinamika tersebut akan menjadi fondasi penting untuk mempertahankan posisi politiknya yang telah tinggi, atau bahkan memungkinkan kandidat untuk melenting lebih jauh. Dalam kerangka ini, studi kasus Ajeng menunjukkan bahwa keberlanjutan karier politik perempuan sangat ditentukan oleh kapasitas untuk merespons tantangan dari berbagai aspek.

4.2. Disparitas Jalur Politik Perempuan dan Tantangan Berjejaring

Membangun dan merawat jaringan pemenangan merupakan salah satu dinamika krusial yang menentukan keberhasilan seorang aktor politik dalam proses kontestasinya. Jaringan menjadi infrastruktur sosial dan politik yang menopang elektabilitas. Namun, proses membangun jaringan tidak selalu berjalan secara linier atau mulus. Medan kontestasi yang lekat dengan pertautan kekuasaan memengaruhi dinamika di dalamnya. Proses tersebut sering kali dipenuhi oleh beragam faktor internal dan eksternal yang menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri bagi aktor politik.

Kapasitas aktor dalam mengorganisasikan jaringan sangat ditentukan oleh sumber daya politik, sosial, dan kultural yang dimilikinya. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ini kerap kali menjadi batu sandungan dalam proses konsolidasi jaringan pemenangan. Dalam konteks ini, kandidat perempuan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan kandidat laki-laki. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, konstruksi sosial yang bias gender masih dominan dalam banyak ruang politik. Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai entitas yang lebih inferior secara kapasitas maupun legitimasi kepemimpinan (Fakih, 2022). Kandidat perempuan dianggap memiliki daya tawar

yang lebih rendah. Kedua, titik pijak atau latar belakang yang membentuk keterlibatan politik perempuan sangatlah beragam. Keragaman ini secara lebih lanjut turut menciptakan kondisi yang tidak selalu menguntungkan, seperti lintasan yang lebih terjal dan panjang.

Titik pijak ini dalam suatu studi disebut sebagai jalur politik perempuan. Mengacu pada trikotomi yang diajukan oleh Nankyung Choi (2019), terdapat tiga jalur utama yang dilewati perempuan dalam meniti karier politik: *elite pathways*, *grassroots pathways*, dan *middle pathways*. Jalur elit merujuk pada perempuan yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan melalui warisan politik atau jejaring keluarga berpengaruh; jalur *grassroots* berkembang dari aktivisme komunitas dan gerakan sosial; sedangkan jalur *middle* merupakan lintasan campuran yang sering kali dilewati melalui organisasi profesi atau jaringan sipil semi-formal. Disparitas dari ketiga jalur ini menciptakan ragam tantangan yang berbeda, baik dalam hal akses terhadap sumber daya politik maupun kemampuan untuk membangun dan mengelola jaringan kemenangan secara efektif.

Berdasarkan kategori di atas, Ajeng tergolong sebagai politisi perempuan yang menempuh jalur *grassroots*. Lintasan ini bertumbuh dari basis sosial komunitas melalui mekanisme partisipasi kolektif dan pengorganisasian akar rumput. Analisis tersebut didasarkan pada kategori yang dipaparkan Choi (2019) dengan sejumlah kriteria multidimensional yang meliputi motivasi individu untuk terlibat dalam politik, konfigurasi dan konversi modal politik yang dimiliki, artikulasi strategi kemenangan dalam ruang sosial yang kompetitif, serta kondisi personal yang membentuk habitus politiknya.

Tabel 4.2.
Analisis Jalur Politik

Dimensi	Temuan Lapangan
Motivasi	Menjadi perpanjangan tangan konstituen, terutama jaringan perempuan dan kultural NU. Hal ini didasari atas pertimbangan minimnya keterwakilan perempuan dan sedikitnya jumlah suara PKB di Ampelgading saat Ajeng pertama kali maju menjadi caleg.
Modal Politik	Pengalaman organisasi di IPPNU, PMR, OSIS, Pramuka sejak usia remaja; Aktivis PMII dan Senat Mahasiswa di kampus; Pionir Fatayat & Muslimat di Tegalsari Timur; Kader PKB. Ada tambahan akses dan dukungan dari posisi suaminya sebagai kepala desa, namun tidak dominan. Ajeng juga didorong oleh kebijakan afirmasi saat proses pencalonan pertamanya.
Strategi	Menggunakan reputasi sosial dan keberpihakan pada isu perempuan dan anak. Reputasi sosial dibangun Ajeng dengan cara terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pengajian, menghadiri undangan hajatan, takziah, dan lain sebagainya. Ia menggambarkan hal ini sebagai strategi “ <i>ngopeni jaringan</i> ”.
Kondisi Pribadi	Lulusan D3 Akuntansi, bukan dari keluarga elit politik maupun elit agama (hanya simpatisan NU), relatif muda pada saat pencalonan pertama di 2009 (28 tahun), finansial terbatas.

Sumber: Diolah dari Choi (2019) dan Temuan Lapangan

Temuan lapangan pada kasus Ajeng menunjukkan bahwa dalam aspek modal politik, batas antara jalur *elite pathways* dan *middle pathways* tampak cukup samar. Atribusi modal politik yang berasal dari posisi suaminya sebagai kepala desa sering kali dikategorikan sebagai bagian dari modal kekerabatan elit dalam banyak kasus lain, mengingat hubungan kekuasaan berbasis keluarga merupakan ciri khas *elite pathways*. Namun, dalam kasus Ajeng, realitasnya lebih kompleks. Dorongan

dari kebijakan afirmasi perempuan serta keterhubungan dengan aktor-aktor yang merekomendasikan pencalonannya justru lebih mendekati karakteristik *middle pathways*, yang mengandalkan dukungan dari jaringan institusional dan semi-formal. Kategori jalur yang dilalui Ajeng dari sisi modal politik tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan harus dilihat dalam nuansa keterjalinan antarjalur yang dinamis.

Samarnya batasan kategori jalur politik juga terlihat pada aspek kondisi pribadi Ajeng. Umumnya, kandidat perempuan yang menempuh jalur *grassroots* adalah mereka yang berusia relatif tua. Hal ini bisa ditarik dari logika bahwa keterlibatan dalam komunitas membutuhkan waktu panjang untuk membangun legitimasi sosial. Akan tetapi, Ajeng merupakan pengecualian penting. Ia memulai keterlibatan organisasional sejak masa remaja, sehingga hal ini memungkinkan dirinya mengakumulasi pengalaman sosial dan jaringan komunitas jauh lebih awal dibandingkan dengan pola umum kandidat *grassroots* lainnya. Faktor usia muda ini memperlihatkan bahwa titik masuk ke jalur politik akar rumput dapat mengalami variasi, tergantung pada intensitas dan kontinuitas pengalaman sosial-politik yang diperoleh individu.

Meskipun terdapat ambiguitas dalam aspek modal politik dan kondisi pribadi sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal ini tidak serta-merta mereduksi atau menafikan bahwa jalur yang ditempuh Ajeng tetap lebih dominan bersifat *grassroots*. Jika dimensi motivasi dijadikan indikator utama seperti premis Choi (2019), Ajeng tidak menunjukkan tendensi mempertahankan kekuasaan keluarga maupun mencari keuntungan pamor dan material, sebagaimana yang sering

teridentifikasi dalam *elite pathways* dan *middle pathways*. Sebaliknya, Ajeng memperlihatkan konsistensi pada karakteristik jalur akar rumput, antara lain dengan bekal pengalaman organisasi yang panjang, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, kepedulian terhadap isu-isu perempuan dan anak, ketidakberpautan dengan jaringan dinasti politik, serta keterbatasan modal finansial dalam menjalankan aktivitas politiknya. Berbagai bukti ini memperkuat argumen bahwa Ajeng secara substantif lebih tepat diposisikan sebagai aktor politik yang berkembang melalui jalur *grassroots*.

Kategorisasi jalur politik Choi (2019) mendapatkan penyempurnaan melalui kontribusi studi Sinpeng & Savirani (2022), yang menambahkan dimensi konteks sosial kandidat sebagai faktor penting dalam membedakan jalur politik tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar sosial-ekonomi dan jaringan komunitas tempat kandidat tersebut berakar. Dalam kerangka analitis ini, kecenderungan Ajeng sebagai politisi perempuan akar rumput semakin menguat. Berbeda dengan kandidat yang menempuh jalur *networkers*, yang banyak mengandalkan kapital sosial berbasis nama besar keluarga politik, serta kandidat *trailblazers*, yang cenderung bergerak dalam pola politik kewirausahaan dengan orientasi mobilisasi sumber daya secara individual, Ajeng justru membangun karir politiknya melalui jalur aktivisme. Pola karir politik Ajeng mengikuti logika *bottom-up*. Pengaruh politik dibangun secara bertahap melalui keterlibatan aktif di masyarakat, pengorganisasian isu-isu sosial, dan pembentukan legitimasi berbasis kedekatan sosial, bukan melalui akumulasi sumber daya elitis atau logika pasar politik.

Jalur *grassroots* yang ditempuh Ajeng membawa implikasi terhadap karakteristik perjalanan politiknya, khususnya terkait panjangnya lintasan yang harus dilalui untuk mencapai stabilitas konsolidasi kekuatan politik. Jalur ini menurut Sinpeng & Savirani (2022) dikenal sebagai *long pathway*. Proses membangun legitimasi, jaringan, dan dukungan elektoral ditempuh melalui proses bertahap yang memerlukan waktu dan ketahanan pribadi. Pada tahap-tahap awal kontestasi, keraguan Ajeng muncul ketika pertama kali diminta maju sebagai kandidat. Ia merasa inferior, karena menganggap masih ada figur senior yang lebih layak dan berpengalaman. Selain itu, Ajeng juga dibayangi kekhawatiran akan resistensi sosial, mengingat suaminya baru saja menjabat sebagai kepala desa dan ia baru merintis Fatayat di desanya. Pada saat itu, modalitas politik belum terbentuk secara matang.

Ketahanan pribadi Ajeng dalam menghadapi berbagai dinamika menjadi aspek krusial yang membentuk trajektori politiknya. Kematangan mesin politik dan kapasitas pengelolaan kontestasi elektoral baru benar-benar teruji dan terlihat solid pada periode keempat Ajeng mengikuti pemilihan. Indikator paling nyata dari konsolidasi ini adalah perolehan suara yang sangat tinggi secara mutlak. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, meskipun Ajeng berhasil terpilih, tetapi dirinya selalu melalui pertarungan ketat dan selisih suara yang dramatis tipis dibandingkan kandidat lain. Pengalaman Ajeng memperlihatkan bahwa jalur *grassroots* menuntut ketahanan personal dalam jangka panjang sekaligus memerlukan proses kumulatif untuk membangun legitimasi elektoral yang kokoh di tengah keterbatasan modal awal.

Panjang lintasan politik yang ditempuh melalui jalur *grassroots* secara inheren memuat beragam tantangan yang kompleks. Tidak terkecuali dalam konteks membangun dan memelihara jaringan politik, yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam konsolidasi kekuatan elektoral. Dalam perjalanan politik Ajeng, ragam tantangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yakni tantangan kultural, institusional, dan struktural (Savirani, 2024). Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memahami secara lebih sistematis berbagai tantangan yang tidak hanya bersumber dari keterbatasan individu, melainkan juga berakar pada konfigurasi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas.

a. Tantangan Kultural

Tantangan kultural berkaitan erat dengan norma dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di sebagian masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan sering kali dipersepsikan hanya layak berkiprah dalam ranah domestik, dengan lingkup peran yang terbatas pada pengurusan keluarga dan rumah tangga. Kondisi semacam ini menjadi tantangan awal bagi Ajeng, terutama dalam meraih restu dari keluarga inti. Sejak masih berada di bangku kuliah, Ajeng sudah mulai membangun jembatan komunikasi dengan keluarganya mengenai keinginannya untuk terlibat dalam politik praktis. Namun, pada masa itu, keluarganya belum sepenuhnya memberikan restu, bukan hanya karena faktor gender, melainkan juga karena mereka berharap Ajeng menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum memasuki dunia politik.

Setelah menikah dengan Sugi, yang juga merupakan rekan aktivisnya sejak masa kampus dan kemudian menjabat sebagai kepala desa, tantangan terkait

restu tidak signifikan. Sugi memahami dan mendukung Ajeng, dengan satu catatan bahwa Ajeng diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara peran politiknya dengan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Meskipun demikian, tantangan kultural yang lebih berat muncul pada tahap berikutnya, yakni ketika Ajeng sudah memiliki anak. Pada fase ini, Ajeng mengalami pergulatan batin yang intens antara tuntutan tugas sebagai anggota dewan, kebutuhan untuk menjaga dan memperluas jaringan politik, dan kewajiban emosional terhadap keluarganya. Untuk mengatasi dilema ini, Ajeng berusaha membangun pemahaman sejak dini kepada anaknya dengan menggunakan metafora bahwa dirinya adalah "milik banyak orang". Ajeng menanamkan kesadaran bahwa perannya melampaui ruang domestik. Sebagai gantinya, Ajeng mencurahkan seluruh waktunya kepada keluarga setiap akhir pekan atau saat hari libur dinas. Ajeng juga selalu izin dari jauh hari kepada suami dan anaknya ketika ada agenda yang mengharuskan ke luar kota.

Di luar lingkup keluarga, tantangan kultural dari masyarakat desa relatif tidak terlalu berat bagi Ajeng. Hal ini disebabkan oleh latar belakang Ajeng yang telah lama dikenal sebagai aktivis, sehingga pencalonannya tidak menghadapi pendiskreditan berbasis gender secara signifikan. Kapabilitas menjadi aspek yang dapat mereduksi diskriminasi gender. Namun, tantangan kultural tetap hadir dalam bentuk lain, yakni berkaitan dengan identitas ideologis. Basis masyarakat di desa Ajeng sebagian besar adalah simpatisan "merah" atau PDIP, sedangkan Ajeng berafiliasi dengan PKB. Perbedaan identitas politik ini turut menjadi medan kultural yang harus dihadapi Ajeng dalam membangun dan memperkuat dukungan elektoralnya di tingkat lokal.

b. Tantangan Institusional

Tantangan institusional dalam konteks ini lebih melihat pada dinamika peran partai politik sebagai institusi pengusung, karena secara normatif, kerangka hukum nasional sudah mendorong afirmasi politik perempuan melalui kebijakan kuota 30%. Dalam konteks ini, PKB sebagai partai tempat Ajeng bernaung memperlihatkan karakteristik institusional yang cukup progresif. Tidak ditemukan praktik diskriminasi gender yang nyata dalam tubuh partai, setidaknya dalam kasus Ajeng. Penunjukannya sebagai Wakil Ketua DPRD di Periode 2019 kala itu menjadi bukti bahwa rekognisi terhadap kredibilitas dan loyalitas kader menjadi dasar utama dalam distribusi posisi politik, bukan menitikberatkan pada faktor jenis kelamin.

Kendati demikian, dalam praktik di lapangan, partai tidak berfungsi sebagai institusi dominan dalam proses pengorganisasian jaringan pemenangan. Alih-alih menjadi aktor penggerak utama, partai lebih sering berperan sebagai payung legal-formal yang menaungi berbagai kandidat yang berkompetisi di bawah panjinya. Dalam kondisi ini, setiap kandidat, termasuk Ajeng, harus membangun dan mengelola mesin politiknya secara mandiri. Situasi ini memperbesar potensi gesekan antar kader, terutama dalam konteks kompetisi internal. Salah satu pengalaman nyata Ajeng adalah tuduhan kecurangan yang sempat diarahkan kepadanya oleh kandidat perempuan lain dari partai yang sama pada masa-masa awal ia terjun ke dunia kontestasi elektoral. Tuduhan tersebut tidak terbukti, tetapi memperlihatkan bagaimana kompetisi internal di dalam partai bisa menjadi bagian dari tantangan institusional yang harus dihadapi.

Dalam kerangka ini, tantangan institusional dapat dipahami bukan dalam bentuk resistensi berbasis gender secara eksplisit, melainkan dalam dinamika "adu strategi" antarkandidat. Kunci utamanya adalah bagaimana kandidat mampu memaksimalkan fungsi-fungsi partai untuk mendukung dan melindungi proses pengorganisasian jaringan politiknya, di tengah persaingan internal yang ketat. Tantangan institusional ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan politik perempuan dalam jalur *grassroots* tidak semata bergantung pada regulasi afirmatif atau sikap progresif partai. Aspek ketangguhan individu sangat diuji dalam mengelola dinamika internal organisasi politik, yang kerap penuh dengan kompetisi tersembunyi.

c. Tantangan Struktural

Dimensi struktural menjadi aspek paling kompleks. Dalam dimensi ini, terdapat interseksi dua identitas: gender dan kelas ekonomi. Tantangan struktural berkaitan langsung dengan distribusi sumber daya yang timpang dalam masyarakat. Ketimpangan ini bukan sekadar disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki lebih leluasa mengakses ruang publik dan, karenanya, lebih mudah mengakumulasi modal sosial, ekonomi, dan politik. Lebih dalam lagi, terdapat pula jurang ketimpangan yang membedakan pengalaman perempuan berdasarkan latar belakang kelas mereka. Seorang perempuan dari kelompok ekonomi atas akan memiliki akses yang lebih besar terhadap jaringan, modal finansial, dan *platform* politik dibandingkan perempuan dari kelas bawah, bahkan ketika keduanya sama-sama menghadapi hambatan berbasis gender. Kondisi ini berkelindan dengan disparitas jalur politik yang telah disinggung sebelumnya. Kandidat perempuan yang berasal dari jalur elit

atau memiliki modal sosial dan ekonomi kuat cenderung menempuh lintasan politik yang lebih pendek dan lebih mulus, karena tantangan struktural yang mereka hadapi relatif lebih kecil. Sebaliknya, perempuan dari jalur *grassroots* seperti Ajeng harus menempuh lintasan politik yang jauh lebih panjang dan berliku, mengingat keterbatasan sumber daya dan ketidakseimbangan struktural yang secara sistemik menghambat akselerasi karier politik mereka.

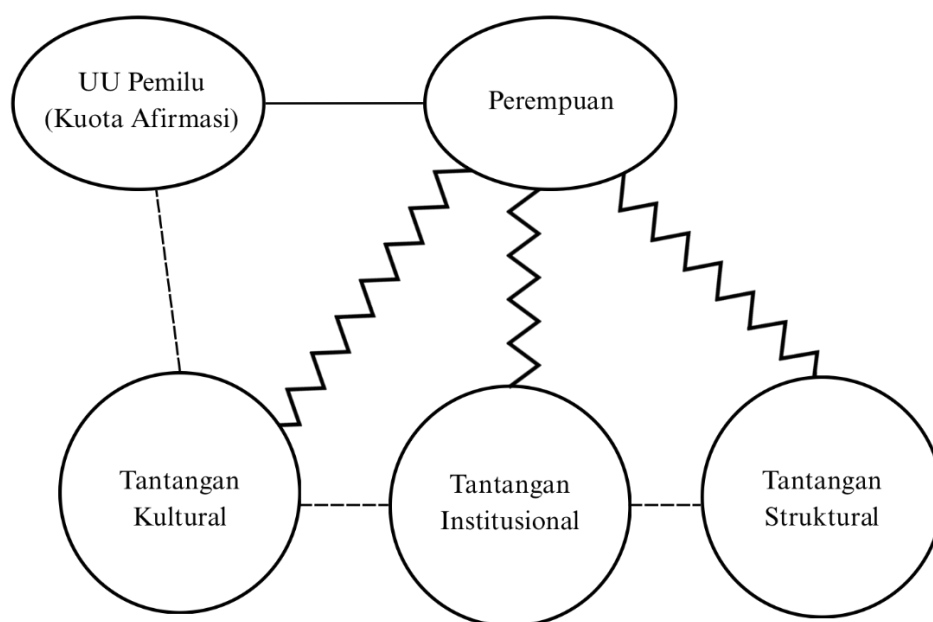
Tantangan struktural menjadi beban terberat dalam perjalanan politik Ajeng, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya finansial yang sangat menentukan dalam kontestasi elektoral. Biaya politik yang tinggi di tingkat lokal menciptakan tekanan besar bagi kandidat, terutama bagi perempuan yang berasal dari jalur akar rumput. Pengelolaan konstituen menuntut pengeluaran berkelanjutan, mulai dari kegiatan sosial, pemberian bantuan informal, hingga pembiayaan kegiatan komunitas yang menjadi bagian integral dari strategi membangun basis elektoral. Di samping itu, praktik patronase yang masih kuat di masyarakat serta tuntutan politik uang, baik sebagai respons terhadap ekspektasi pemilih maupun sebagai upaya mengimbangi strategi lawan, menambah beban keuangan kandidat. Ajeng sebagai kandidat perempuan menghadapi tantangan berlapis. Ketergantungan struktural perempuan terhadap laki-laki dalam aspek finansial masih menjadi realitas. Dalam kasus Ajeng, peran suami sebagai penyokong utama modal finansial diilustrasikan melalui istilah "Pak Bendahara".

Kehadiran *new comers* ternyata juga menambah kompleksitas tantangan finansial. Mereka kerap membawa sumber daya lebih besar dan kekuatan jaringan baru. Ajeng pernah mengalami dampak dari dinamika ini, ketika posisi nomor

urutnya dalam daftar pencalonan harus bergeser akibat masuknya kandidat baru yang memiliki "surat sakti" dari pusat. Kepemilikan surat sakti tersebut merujuk pada kekuatan finansial dan dukungan politik yang mampu memengaruhi keputusan formal partai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam jalur politik akar rumput, ketimpangan sumber daya dan adanya fluktuasi dalam medan persaingan politik dapat menjelma menjadi tantangan yang lebih besar akibat ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi antar kandidat.

Gambar 4.3.

Posisi Kandidat Perempuan, Kuota Afirmasi, dan Tantangan Berjejaring



Sumber: Diolah dari Elizabeth (2019) dan Temuan Lapangan

Gambar di atas secara visual merepresentasikan hubungan kompleks antara kandidat perempuan, keberadaan kebijakan kuota afirmasi, dan dinamika tantangan yang dihadapi kandidat perempuan dalam arena politik. Garis lurus yang menghubungkan kuota afirmasi dengan kandidat perempuan memperlihatkan relasi

yang positif dan ideal, seolah afirmasi gender secara langsung mendukung keterwakilan perempuan di ruang politik formal. Namun, dalam kenyataan praktik, hubungan tersebut tidak sepenuhnya linier dan mulus. Hal ini tergambar dari adanya garis zig-zag yang menggambarkan pertentangan serta ketegangan, menandai bahwa dalam proses implementasinya, kandidat perempuan tetap harus berhadapan dengan beragam hambatan kultural, institusional, dan struktural yang telah dijelaskan sebelumnya.

Lebih jauh, keberadaan garis putus-putus dalam gambar menunjukkan bahwa walaupun kuota afirmasi dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan, tetapi pada praktiknya ia tetap terhubung dengan beragam tantangan tersebut (Elizabeth, 2019). Hubungan ini sering kali terlihat samar, atau bahkan diabaikan dalam analisis yang bersifat normatif. Dalam kata lain, kuota afirmasi memang menyediakan kerangka legal bagi peningkatan representasi perempuan, tetapi tidak serta-merta menghilangkan hambatan-hambatan sistemik yang berakar dari norma sosial patriarkal, bias institusional, serta ketimpangan distribusi sumber daya.

Temuan ini memperkuat kritik terhadap implementasi kuota afirmasi di banyak konteks, terutama soal aturan afirmatif gender yang cenderung menjadi formalitas administratif semata, tanpa disertai transformasi substantif terhadap kultur politik dan struktur institusional yang mendasarinya. Dengan demikian, dalam membaca relasi antara kuota afirmasi dan dinamika politik perempuan, penting untuk memahami bahwa instrumen kebijakan ini berjalan dalam ketegangan antara niat afirmatif di satu sisi, dan kenyataan resistensi sosial-struktural di sisi lain.

Temuan lapangan dalam kasus Ajeng tidak sepenuhnya menegaskan premis dari studi terdahulu yang menekankan pentingnya modalitas finansial bagi keterpilihan kandidat (Bjarnegard & Kenny, 2016; Wardani & Subekti, 2021; Lagabuana, Sukri, & Haryanto, 2021). Namun, aspek yang perlu diberi perhatian khusus dalam konteks ini adalah bagaimana aktor perempuan seperti Ajeng mampu menunjukkan keagenan yang aktif dalam merespons keterbatasan struktural. Alih-alih bergantung pada modal finansial, Ajeng berhasil mengkapitalisasi berbagai bentuk modalitas lain, khususnya jaringan sosial dan politik yang telah ia bangun sejak lama melalui organisasi dan dunia aktivisme. Kemampuannya dalam memperluas, merawat, dan mengonsolidasikan jaringan bukan hanya menjadi faktor kunci yang mendorong keterpilihan dalam kontestasi politik, melainkan juga memungkinkan Ajeng untuk mempertahankan dan menaikkan posisi politiknya. Studi Bayo (2021) mencatat temuan yang relevan. Kegigihan kandidat perempuan, terutama pada kesediaan mereka untuk berulang kali turut serta dalam kontestasi, dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan dan keterampilan baru sekaligus membangun modal politik. Kegigihan ini dapat menjadi solusi dari ketidaksiapan perempuan bertarung dalam arena kontestasi politik sebagaimana yang sering disebutkan dalam banyak literatur.

Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi Ajeng sepanjang proses kontestasi pada akhirnya berhasil diatasi berkat kegigihan dan peran aktif jaringan yang secara konsisten ia libatkan dalam setiap tahap politiknya. Ketekunan dalam membangun, memelihara, dan memperluas jaringan menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasikan dukungan politik di tingkat lokal. Dari proses inilah

penguatan posisi politik dalam struktur politik lokal mulai terbentuk. Ia mampu mengakses berbagai bentuk modalitas lain secara bertahap melalui pola "tambal sulam" sumber daya, yang secara proaktif dioptimalkan untuk memperkuat daya tawarnya dalam arena politik. Artikulasi strategi ini menunjukkan bahwa mobilitas politik, khususnya bagi kandidat perempuan dari jalur akar rumput, tidak semata bergantung pada ketersediaan modal sejak awal, tetapi juga pada kemampuan adaptif untuk merekonstruksi sumber daya yang ada, membangun kepercayaan, dan memperluas basis legitimasi sosial-politik secara bertahap.

Pada posisinya saat ini, Ajeng menunjukkan kecenderungan bergerak mendekati kategori *middle pathways*. Indikasi mobilitas vertikal ini tampak dari dua dinamika penting. Pertama, naiknya jabatan Ajeng seiring dengan bertambahnya akses terhadap berbagai sumber daya strategis. Kedua, berkembangnya motivasi politik yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kerja-kerja advokasi berbasis komunitas, tetapi juga pada upaya memperkuat posisi sosial, politik, dan ekonomi di tengah medan politik yang lebih luas. Jika pada fase awal karier politiknya Ajeng lebih banyak digerakkan oleh idealisme aktivisme akar rumput, maka kini, transformasi motivasi tersebut juga diiringi dengan bertambahnya sorotan dan perhatian dari beragam aktor dalam jaringan politik lintas sektoral.

Perbedaan orientasi dan pola ini turut terbentuk dari perubahan komposisi jaringan yang ia kelola. Jaringan politik Ajeng kini tidak lagi terbatas pada basis dukungan komunitas desa atau kelompok sosial akar rumput, melainkan sudah mencakup aktor-aktor dari berbagai spektrum kekuasaan, termasuk elit partai,

pengusaha, dan organisasi perempuan dalam lingkup yang lebih luas. Perluasan jejaring ini mengubah medan pertarungan politik Ajeng, sekaligus memperbesar sumber daya sosial-politik yang dapat ia mobilisasi untuk mengamankan dan memperkuat posisinya. Dengan kecenderungan mobilitas ini, terbuka peluang baginya untuk menempuh lintasan politik yang relatif lebih pendek dibandingkan periode-periode sebelumnya. Secara logis, mengingat ia telah melalui proses panjang membangun jaringan, legitimasi, dan kapasitas politik sejak lama, Ajeng saat ini berada dalam posisi untuk memanfaatkan akumulasi modal tersebut. Proses ini mampu mengakselerasi laju karier politik kandidat, menjadikannya bergerak dari *long pathway* menuju *medium-length pathway*.

Proses kemenangan Ajeng memberikan ilustrasi penting tentang bagaimana jalur politik perempuan tidak bersifat stagnan. Tipologi jalur dapat mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, bergantung pada akumulasi sumber daya, perubahan orientasi motivasi politik, serta perluasan jaringan kekuasaan yang berhasil dikapitalisasi. Hal ini memperkaya wacana tentang dinamika jaringan dan penguatan posisi politik perempuan, yang dalam banyak kasus tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh strategi agensi individual yang adaptif terhadap perubahan lingkungan politik.